

Dugaan Korupsi BUMDes Kandawati, Ketum RJN Berharap Oknum yang Terlibat Segera Ditindak

Sopiyan Hadi - TANGERANG.INDONESIASATU.CO.ID

May 27, 2021 - 12:45

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang tanggal 25 Januari 2021 nomor 141/34/2021 perihal Permohonan Data Legalitas dan laporan keuangan BUMDes 2020.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB X Pasal 87-88 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengolahan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa dalam rangka percepatan pembangunan melalui usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu dibentuk dan diberdayakan lembaga usaha Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Maka dengan ini kami mengintruksikan dan menghimbau kepada Kepala Desa agar dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bagi Kepala Desa yang **belum** membentuk BUMDes agar segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
2. Bagi Desa yang **sudah** membentuk BUMDes agar segera menyampaikan dan melengkapi foto copi Peraturan Desa (PERDES), SK Kepala Desa dan AD-ART BUMDes dan laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2020.
3. Bagi kepengurusan BUMDes yang **sudah** habis masa jabatannya maka agar segera membentuk kembali sesuai hasil kesepakatan Musdes dan menyampaikan laporan kegiatan (LPJ) kepada Kepala Desa sebagai penasehat dan pengawas, tembusan DPMPD dan Camat.
4. Bagi Desa yang **sudah** memberikan penyertaan modal dari Dana Desa (DD) kepada BUMDes, maka bagi pengurus BUMDes segera menyampaikan Laporan Keuangan BUMDes tahun 2020 yang berisikan hasil jumlah Pendapatan Asli Desa (PADES) yang disetor melalui rekening Desa.

Diharapkan data tersebut dapat disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Februari 2021 ke Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DPMPD Kabupaten Tangerang melalui surat resmi dengan nomor, tanggal, dan tanda tangan.

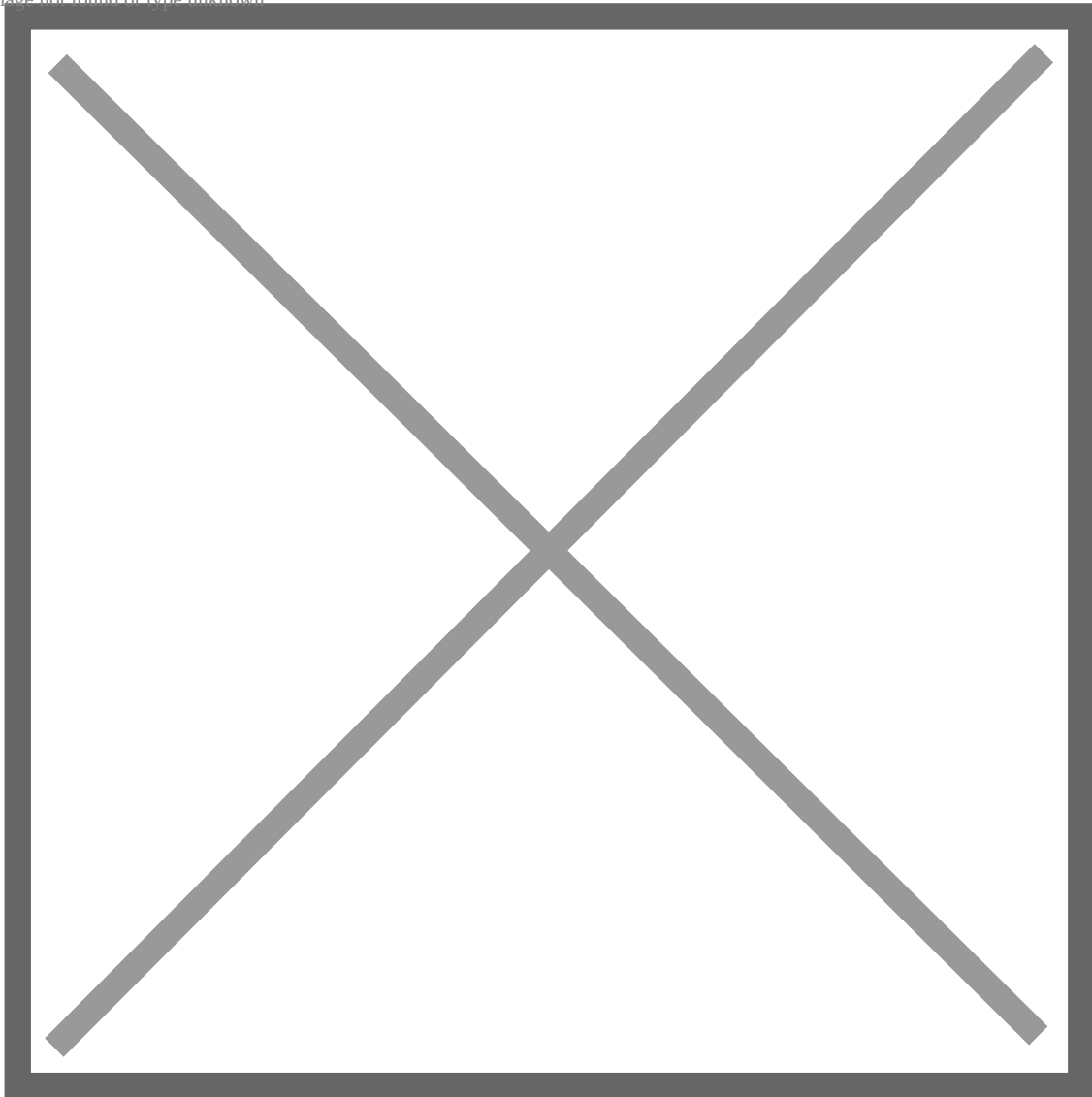
TANGERANG - Kasus tindakan pidana korupsi Anggaran Dana BUMDes Kandawati Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp 436.000.000, yang ramai di beberapa media online dan menjadi sorota publik, menjadi salah satu kasus yang harus segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kamis (27/05/2021).

Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) yang merupakan Organisasi Pers, sangat mengapresiasi pihak Kepolisian dalam persoalan kasus tindak pidana korupsi Anggaran Dana BUMDes Kandawati yang bermuasal dari pemberitaan di banyak media online Nasional.

Bentuk sinergi yang positif antara Pers dan Pemerintah dalam hal ini pihak Polri, karena bagaimanapun Pers merupakan salah satu dari 4 pilar di NKRI, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan yang terakhir adalah Pers.

Image not found or type unknown



Arfendy Ketua Umum Ruang Jurnalis Nusantara mengapresiasi sekaligus berharap kepada pihak Kepolisian Polresta Tangerang, untuk segera menindak lanjuti kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana BUMDes Kandawati Tahun Anggaran 2018-2019.

" Bentuk sinergi antara Pers dengan Pemerintah mempunyai peranan penting untuk kemajuan Negara, karena Pers merupakan salah satu dari 4 Pilar di NKRI yang kita cintai ini, RJN sangat mengapresiasi pihak Kepolisian terutama pihak Polresta Tangerang, kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana BUMDes Kandawati Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp 436.000.000 yang

sekarang sedang ditangani oleh pihak Polresta Tangerang ", ujarnya.

" Kami berharap kasus tersebut segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan Asas Praduga tak Bersalah agar keadilan bisa ditegakkan", tegasnya.

Arfendy menambahkan," Semoga penegak hukum dapat segera mengusut tuntas dan memproses siapapun yang terlibat dalam persoalan penyimpangan Anggaran Dana BUMDes Kandawati, media yang tergabung di RJN akan mengawal Kasus ini sampai dengan selesai dan yang terbukti bersalah mendapatkan sanksi yang setimpal", pungkasnya.

(Sopiyan)